

Catatan Parlemen

Edisi Oktober 2024



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



Dr. Hj. Netty Prasetiyani, M.Si

Anggota DPR RI 2024-2029: Wujudkan Kesejahteraan dan Melindungi Kelompok Rentan



dr. Gamal

Catatan Kritis Kesehatan Indonesia

Riyono, S.Kel., M.Si.

“Darurat” Politik Pangan Indonesia



H. Johan Rosihan, S.T.

Swasembada Pangan, PR Berat Pemerintahan Prabowo

Saadiah Uluputty, S.T

Hari Pangan Sedunia: Ketahanan Pangan dan Tantangan Global yang Harus Kita Atasi





Catatan Kritis Kesehatan Indonesia

dr. GAMAL ALBINSALD

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Indonesia sedang menghadapi Triple Burden Disease yaitu masih adanya Penyakit Menular (Communicable Disease), tingginya angka kesakitan dan kematian akibat Penyakit Tidak Menular (Non-Communicable Disease), dan munculnya penyakit baru (New Emerging Infectious Disease). Apa saja masalah kesehatan kita hari ini?

1. Peningkatan Penyakit Tidak Menular

Badan Pusat Statistik (BPS) menghimpun jumlah kematian berdasarkan penyebabnya. Data ini dihimpun sejak 1 Januari 2017 hingga 2020/2022, saat long form sensus penduduk dilakukan. Secara keseluruhan jumlah kematian mencapai 8,07 juta kasus pada kurun waktu tersebut. Dari jumlah tersebut, penyebab terbanyak berasal dari sakit karena penyakit tidak menular, dengan 7,03 juta kasus. Data WHO menunjukkan terdapat 10 penyakit sebagai penyebab kematian tertinggi di Indonesia, diantaranya stroke 131,8, jantung iskemik 95,68, Diabetes 40,78 kasus ke-

matian per 100 ribu penduduk.

Hal ini juga sesuai dengan biaya kasus Penyakit di BPJS Kesehatan tahun 2023, dimana Penyakit jantung menjadi Penyakit dengan biaya BPJS Kesehatan tertinggi dengan 10,28 triliun, diikuti kanker 3,54 triliun, dan stroke 2,55 triliun.

2. Udemutrisasi

Gizi merupakan salah satu aspek kunci bagi pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan pembangunan bangsa. Berdasarkan hasil SKI

Catatan Kritis Kesehatan ... (2)

2023, prevalensi stunting sebesar 21,5%. Sekitar 1 dari 5 balita di Indonesia mengalami stunting dengan kasus terbanyak pada kelompok usia 24 sampai 35 bulan.

Prevalensi stunting mengalami penurunan lambat selama 10 tahun terakhir (2013-2023), dari 30,8% (2018), 27,67% (2019), 24,4% (2021), 21,6% (2022), hingga 21,5% (2023). Untuk tahun 2024 ini target yang perlu dicapai adalah 14%, yaitu masih 7,5 persen dari capaian tahun 2023. Tahun 2023 terdapat 11.896.367 keluarga yang beresiko stunting (BKKBN) yang berpotensi menghambat penurunan prevalensi stunting. Anggaran yang sudah

dialokasikan untuk penanganan stunting sebenarnya sudah cukup memadai, namun kinerja anggaran tersebut belum mencapai target yang diharapkan. Ditahun 2021 dengan anggaran 35,3T angka stunting turun 1,7% (2022), Tahun 2022 anggaran 34,1T angka stunting turun 0,1% (2023) dan di tahun 2023 anggaran 30 T dengan harapan angka stunting turun sekitar 7% di tahun 2024.

3. Overnutrisi

Menurut data International Diabetes Federation (IDF) 2021, Indonesia kini menduduki peringkat lima sebagai negara dengan kasus diabetes terbanyak di dunia. Menurut

data IDF 2021, ada 19,5 juta orang Indonesia berumur 20-79 tahun yang kena diabetes di Indonesia. Pada tahun 2011, kasus diabetes di Indonesia masih ada di angka 7,29 juta. Artinya, kasus diabetes di Indonesia meningkat 166,94 persen dalam 10 tahun terakhir. IDF juga memprediksi Indonesia masih akan menduduki peringkat 5 di 2045 mendatang. Perkiraannya, kasus diabetes Indonesia akan mencapai 28,6 juta atau meroket 46,6 persen.

Menurut data Global Nutrition Report, kasus obesitas di Indonesia juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, kasus obesitas di Indonesia mencapai 14,8 juta kasus. Artinya ada peningkatan sekitar 4 kali lipat sejak tahun 2000 lalu.

Satu orang Indonesia mengonsumsi gula pasir sebanyak 160gram dalam sehari. Angka tersebut jelas lebih besar daripada anjuran Kemenkes atau bahkan WHO. Sebab konsumsi gula pasir di Indonesia 6 kali lebih tinggi anjuran WHO yaitu 25 gr per hari dan maksimal 50gr per hari.

4. Sedentary Lifestyle

Sedentary Lifestyle adalah kegiatan mengacu pada segala jenis aktivitas yang dilakukan di



Menurut data International Diabetes Federation (IDF) 2021, Indonesia kini menduduki peringkat lima sebagai negara dengan kasus diabetes terbanyak di dunia.

luar waktu tidur, dengan karakteristik keluaran kalori sangat sedikit yakni <1.5 METs. Dampak dari perilaku sedenter adalah obesitas, penyakit jantung koroner, diabetes melitus, kanker, dan depresi.

Di Indonesia, penduduk usia >10 tahun memiliki perilaku sedenter 3-5,9 jam per hari. Penelitian tentang aktivitas fisik dan kebiasaan sedenter pemuda Indonesia menunjukkan prevalensi aktivitas fisik yang "cukup" hanya berkisar antara 12,2% dan 52,3%, sedangkan prevalensi perilaku sedentary ≥ 3 jam per hari berkisar antara 24,5% dan 33,8%.

5. Gangguan Mental Pemuda

Survei mengenai kesehatan mental pada remaja di Indonesia tahun 2022, mendapatkan hasil 5,5% remaja usia 10-17 tahun mengalami gangguan mental. Sebanyak 1% remaja mengalami depresi, 3,7% cemas, post traumatic syndrome disorder (SPTSD) 0,9%, dan attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) sebanyak 0,5%. Secara Nasional, prevalensi depresi di Indonesia pada tahun 2023 sebesar 1,4%. Prevalensi depresi paling tinggi ada pada kelompok anak muda (15-24 tahun), yaitu sebesar 2%.

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018

Anggaran yang sudah dialokasikan untuk penanganan stunting sebenarnya sudah cukup memadai, namun kinerja anggaran tersebut belum mencapai target yang diharapkan. Ditahun 2021 dengan anggaran 35,3T angka stunting turun 1,7% (2022), Tahun 2022 anggaran 34,1T angka stunting turun 0,1% (2023) dan di tahun 2023 anggaran 30 T dengan harapan angka stunting turun sekitar 7% di tahun 2024.

Catatan Kritis Kesehatan ... (3)

menyatakan bahwa 6,2% penduduk berusia 15-24 tahun mengalami depresi, lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi.

Depresi merupakan penyebab utama disabilitas pada remaja. Depresi dapat menjadi penyebab bunuh diri, dan bunuh diri merupakan penyebab ke-4 kematian pada remaja di dunia. Kebanyakan dari gangguan psikologis tersebut tidak disadari dan

tidak mendapatkan penanganan yang tepat.

6. Polusi Udara

Laporan Indeks Kualitas Udara Kehidupan (AQLI) menyebut Indonesia sebagai satu dari enam negara yang paling berkontribusi terhadap polusi udara global. Polusi udara partikulat halus (PM2.5) memperpendek harapan hidup rata-rata penduduk Indonesia hingga 1,4 tahun, dibandingkan dengan harapan hidup jika pedoman WHO (5 µg/m³) terpenuhi.

Hampir seluruh dari 272 juta penduduk Indonesia tinggal di daerah yang tingkat polusi partikulat tahunannya melebihi guideline WHO. Lebih dari separuh penduduk tinggal di daerah yang melebihi standar nasional sebesar 15 µg/m³.

Diukur dari segi harapan hidup, polusi partikulat merupakan salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan masyarakat Indonesia, yang mengurangi 1,4 tahun harapan hidup rata-rata penduduk Indonesia. Sebaliknya, diabetes dan infeksi ginjal mengurangi harapan hidup rata-rata hingga 1,2 tahun, sementara infeksi pernapasan mengurangi harapan hidup hingga 1 tahun. Masyarakat yang tinggal di

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menyatakan bahwa 6,2% penduduk berusia 15-24 tahun mengalami depresi, lebih dari 19 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk berusia lebih dari 15 tahun mengalami depresi.

Jakarta sebagai provinsi dengan polusi tertinggi di Indonesia akan kehilangan harapan hidup rata-rata hingga 2,4 tahun jika dibandingkan dengan guideline WHO,

7. Jumlah dan Distribusi Tenaga Kesehatan.

Menurut data Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), per tanggal 24 April 2024 ada 279.321 dokter yang teregistrasi di Indonesia terdiri dari dokter umum 174.407 orang (62,4%), dokter spesialis 53.779 orang (19,3%), dokter gigi 45.492 orang (16,3%), dan dokter gigi spesialis 5.643 orang (2%).

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO: World Health Organization) merekomendasikan setiap negara di dunia harus berusaha memenuhi kriteria "Golden Finishing Line", yaitu rasio dokter terhadap penduduk atau pasien mencapai 1:1000. Satu dokter untuk seribu warga. Dengan penduduk Indonesia

Agustus 2024 sebesar 282 juta jiwa, maka Indonesia idealnya memiliki 282 ribu dokter untuk memenuhi garis akhir emas. Dengan demikian kita kekurangan 108 ribu dokter.

Sebagai perbandingan, berdasarkan data WHO, rasio dokter di beberapa negara ASEAN, Singapura 2,4 dokter per 1.000 penduduk, Malaysia 2,2 per 1.000 penduduk, dan Brunei per 1.000 penduduk

Kita juga memiliki masalah distribusi tenaga kesehatan, dimana masih terdapat 436 Puskesmas tanpa Dokter dan 75% dari puskesmas tersebut berada di wilayah Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK). Sebanyak 50% puskesmas di Maluku dan Papua tidak memiliki dokter.

8. Peningkatan Biaya Kesehatan

Hasil riset Mercer Marsh Benefits (MMB) pada Health Trends 2023 menyatakan bahwa Medical Trend Rate di



Peningkatan biaya kesehatan terjadi karena inflasi biaya alat-alat medis, obat, dan perawatan, peningkatan teknologi kesehatan, dan tertundanya banyak perawatan

Catatan Kritis Kesehatan... (End)

tundanya banyak perawatan selama pandemi. Di Indonesia banyak alat medis dan Bahan Baku Obat (BBO) impor dengan biaya pajak yang tinggi. Hal ini sebagai akibat lemahnya riset medis di Indonesia. Peningkatan biaya kesehatan ini juga hasil positif dari meningkatnya kesadaran tentang kesehatan pasca-pandemi COVID19, akses informasi kesehatan yang lebih mudah secara digital, dan peningkatan sosio-ekonomi masyarakat.

Indonesia diproyeksikan meningkat hingga 13,6 persen di 2023. Prediksi biaya kesehatan di Indonesia lebih tinggi dari Asia sebesar 11,5 persen dan lebih tinggi dari inflasi keuangan Indonesia tahun 2022 sebesar 5,5 persen. Inflasi biaya kesehatan ini adalah kondisi yang terjadi sebagai salah satu dampak dari inflasi ekonomi yang terjadi setiap tahun.

Peningkatan biaya medis tersebut juga berdampak pada peningkatan klaim asuransi kesehatan, termasuk BPJS. Laporan AAJ menyatakan klaim kesehatan mengalami peningkatan 24,9% year-on-year

dari Rp 16,68 triliun pada 2022 menjadi Rp 20,83 triliun pada 2023. Terjadi peningkatan klaim asuransi kesehatan sebesar 32,9% secara year on year.

Kenaikan juga terjadi pada klaim BPJS Kesehatan dari 90,33 triliun pada tahun 2021, 113,47 triliun pada tahun 2022, hingga 158,85 triliun pada tahun 2023. BPJS Kesehatan mengalami pendapatan tertinggi tahun 2023 dengan total pendapatan 151,46 triliun, namun mengalami defisit 7,9 triliun.

Peningkatan biaya kesehatan terjadi karena inflasi biaya alat-alat medis, obat, dan perawatan, peningkatan

teknologi kesehatan, dan tertundanya banyak perawatan selama pandemi. Di Indonesia banyak alat medis dan Bahan Baku Obat (BBO) impor dengan biaya pajak yang tinggi. Hal ini sebagai akibat lemahnya riset medis di Indonesia. Peningkatan biaya kesehatan ini juga hasil positif dari meningkatnya kesadaran tentang kesehatan pasca-pandemi COVID19, akses informasi kesehatan yang lebih mudah secara digital, dan peningkatan sosio-ekonomi masyarakat.

9. Tantangan Anggaran Kesehatan

Dalam lima tahun terakhir anggaran fungsi kesehatan terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari sebesar Rp 119,9 triliun pada tahun 2020, menjadi Rp 124,4 T pada tahun 2021, menjadi Rp 134,8 T pada tahun 2022, menjadi Rp 172,5 T pada tahun 2023, dan sebesar Rp 186,4 T pada tahun 2024. Anggaran kesehatan tersebut utamanya terkait penanganan pandemi COVID dan membayar premi PBI BPJS.

Data BPS februari 2024 menunjukkan jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,2 juta orang dan setengah menganggur 12,11 juta orang. Mereka berpotensi



WHO mendorong negara-negara untuk mengalokasikan anggaran minimal 15% dari total anggaran negara atau setara dengan 5% dari PDB.

tidak mampu membayar iuran BPJS dan Pemerintah perlu mempersiapkan anggaran untuk peningkatan peserta PBI. Hal itu dikuatkan dari data Sistem Monitoring DJSN dimana 20,5% atau 55 juta jiwa status BPJS tidak aktif karena tidak membayar atau menunggak iuran. Mulai Januari hingga Mei 2024 terjadi peningkatan peserta tidak aktif. Selain itu terjadi peningkatan peserta BPJS kelas 3 menjadi 192 juta

di tahun 2024 yang membutuhkan subsidi iuran dari Pemerintah.

WHO mendorong negara-negara untuk mengalokasikan anggaran minimal 15% dari total anggaran negara atau setara dengan 5% dari PDB. Oleh karena itu, hilangnya mandatory spending dalam RUU kesehatan saat pembiayaan kesehatan meningkat signifikan adalah regresi dalam regulasi kesehatan. ●



“Darurat” Politik Pangan Indonesia

RIYONO, S.Kel., M.Si.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Timur VII / Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan

Semarang (15/10) — Hari pangan sedunia akan diperingati 16 oktober mendatang. Pangan sebagai problem utama rakyat memiliki porsi hampir 70% dalam kehidupan rakyat. Jika pangan terpenuhi maka keluarga akan kuat dan negara berdaulat.

Kepemimpinan Jokowi

selama 10 tahun akan berakhir dalam hitungan jari faktanya urusan pangan menjadi sumber kegaduhan nasional yang berujung kepada silat lidah para pemangku kepentingan.

Program cetak lahan 1 juta Ha yang ternyata hanya berjalan 50%, tolak impor beras yang ujungnya selama Jokowi beras

impor hampir 10 juta ton masuk ke Indonesia, food estate yang oleh para pakar diragukan ternyata juga stagnan, belum lagi kemampuan menjaga ketersediaan pangan melalui Bulog yang justru membuat Bulog merugi ratusan milyar. Lalu apa sebenarnya agenda politik pangan pemerintahan Jokowi?

"Darurat" Politik Pangan... (2)

Jargon vs Kebijakan Impor

Memang tidak mudah merealisasikan janji Stop Impor Pangan. Janji ini keren dan menyihir publik seolah berani dan berdaulat. 2 periode berjalan ternyata Jokowi tidak mampu merealisasikan janji ini. Perdagangan pangan global saat ini menuju titik ketimpangan serius, arus barang produk pangan mengalir keras dari negara maju ke negara berkembang dan miskin dengan tujuan utama "memastikan" kedaulatan panganya.

Ketergantungan menjadi target mereka, Negara maju melihat negara berkembang sebagai market empuk sekali-gungunci dengan harga

pangan yang semakin mahal.

Dikutip dari bisnis.com indeks Harga Pangan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO Food Price Index/FFPI) pada April bertengger di 120,9 poin atau naik 1,7 persen dibandingkan dengan indeks pada Maret 2021. Indeks ini juga 30,8 persen lebih tinggi dibandingkan dengan April 2020.

Pada September 2024, FPIX mengalami peningkatan 3% menjadi 124,4 poin, yang merupakan peningkatan bulanan terbesar sejak Maret 2022.

Kenaikan pada April juga menjadi indikasi tren harga pangan yang terus merangkak dalam 11 bulan terakhir, sekali-gum memecahkan rekor indeks

tertinggi sejak Mei 2014.

FAO melaporkan kenaikan pada April disumbang oleh naiknya sejumlah komoditas. Kontribusi kenaikan terbesar berasal dari gula, minyak nabati, daging, produk susu, dan sereal. Dari kelompok komoditas tersebut, sebagian diimpor Indonesia dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Sebagai contoh, Indonesia telah mengimpor 1,19 juta ton gula mentah selama Januari-Februari 2021 dengan nilai US\$471,35 juta untuk memenuhi kebutuhan industri dan konsumsi. Jika dirata-rata, maka harga gula mentah impor berada di kisaran US\$0,39 per kilogram (kg). Adapun pada periode yang sama tahun lalu, impor gula mentah mencapai US\$239,68 juta dengan volume 699.878 ton dengan harga rata-rata saat itu US\$0,34 per kg.

Kenaikan harga juga tecermin dari importasi biji kedelai yang secara volume naik 10,04 persen dari 403.873 ton pada Januari-Februari 2020 menjadi 444.434 ton pada 2021. Namun dari sisi nilai impor, kenaikan mencapai 36,47 persen dari US\$164,53 juta menjadi US\$224,54 juta pada periode tersebut. Impor kedelai Indonesia



Peningkatan. Terbesar Pada September 2024, FPIX mengalami peningkatan 3% menjadi 124,4 poin, yang merupakan peningkatan bulanan terbesar sejak Maret 2022. (Image :Istimewa)

Program cetak lahan 1 juta Ha yang ternyata hanya berjalan 50%, tolak impor beras yang ujungnya selama Jokowi beras impor hampir 10 juta ton masuk ke Indonesia, food estate yang oleh para pakar diragukan ternyata juga stagnan, belum lagi kemampuan menjaga ketersediaan pangan melalui Bulog yang justru membuat Bulog merugi ratusan milyar. Lalu apa sebenarnya agenda politik pangan pemerintahan Jokowi?

Pada 2023, Indonesia mengimpor kedelai sebesar 2,67 juta ton atau 2,16% dari periode sama tahun lalu (year-on-year/yo). Capaian ini

menjadi yang paling rendah sepanjang sejarah. BPS mencatat sejak 2017 - 2023 ada tren menurun impor kedelai, tetapi dari sisi jumlah

"Darurat" Politik Pangan... (3)

masih cukup besar.

Laporan FAO diatas memberikan gambaran betapa tidak berdayanya Indonesia ditengah serbuan produk pangan impor yang sudah sampai pasar rakyat dan bahkan pasar gelap. Slogan stop impor pangan baru

menjadi jargon politik belum menjadi kebijakan politik serius yang ditepati oleh Jokowi. Akhirnya impor menjadi senjata ampuh untuk memenuhi pangan nasional.

Kondisi ke depan impor akan semakin meningkat karena lahirnya UU 11 tahun

2020 tentang Cipta kerja tidak menjadikan produksi dalam negeri sebagai cara utama memenuhi pangan, tetapi impor akan didahulukan dengan alasan "kondisi tertentu".

Bahkan di tengah pandemi yang petani mampu produksi beras dan bahkan surplus di bulan mei rakyat dikejutkan dengan kebijakan impor yang karena tekanan publik akhirnya Jokowi membatalkan. Aneh bin ajaib bulan juli ada beras impor masuk 40.000 ton, ketidakmampuan menahan impor ini memberikan sinyal bahwa ada kekuatan dibalik kebijakan impor yang membuat pangan kita semakin tergantung dengan impor.

Apa gak boleh impor? Boleh saja, hanya pemimpin itu di tagih janjinya karena itu hutang ke rakyat. Harus dibayar dengan kebijakan, bukan dibayar dengan lanjutan impor. Sampai kapan rakyat terus di PHP.

Mampukah kita Berdaulat?

Jawabannya mampu. Produksi nasional beras khususnya selalu surplus kisaran 1 - 2 juta ton/tahun. Beras cadangan nasional yg di simpan Bulog dengan volume 2 juta ton untuk kebutuhan cadangan jika terjadi pakeklik dan gagal panen nasional. Faktanya beras Bulog bany-

Tingkatkan serapan produk lokal, benahi tata niaga produk strategis nasional seperti beras, jagung, gula, garam, ikan dengan kebijakan yang menstimulan umkm serta industri berbasis modal dalam negeri. Kenapa Vietnam mampu terus menjadi sumber impor beras Indonesia? Karena selain produksi berlebih pemerintahnya melindungi petani dengan maskimal, alih teknologi semakin maju, petani semakin sejahtera.

ak tidak tersalurkan, bahan rusak di gudang dan menimbulkan kerugian ratusan milyar.

Fakta lain juga tidak ada kebutuhan ekstrim pangan selama 20 tahun terakhir yang mengakibatkan kelaparan rakyat. Lalu jika kondisinya begitu kenapa kita harus impor? Kepentingan rente dan oligarki yang berujung kerusakan politik pangan nasional. Saatnya kita sekarang berani menyatakan Indonesia berdaulat pangan.

Tingkatkan serapan produk lokal, benahi tata niaga produk strategis nasional seperti beras, jagung, gula, garam, ikan dengan kebijakan yang menstimulan umkm serta industri berbasis modal dalam negeri. Kenapa Vietnam mampu terus menjadi sumber impor beras Indonesia? Karena selain produksi berlebih pemerintah-

nya melindungi petani dengan maskimal, alih teknologi semakin maju, petani semakin sejahtera.

Nelayan - nelayan cina yang menangkap ikan ilegal di Laut Natuna Utara saja dimodali negara dengan kapal dan sistem usaha yang saling menguntungkan. Nelayan Indonesia menangkap ikan malah takut ke keamanan laut karena takut kena pungli.

Ironi dan beda kelas dalam berdaulat. Soal berdaulat ini kadang bukan soal produksi semata, namun juga soal politik dan kemauan pemimpin soal kebijakan yang pro kepada nasionalisme bidang pangan. Selama ini kita belum menemukan keberanian dalam kebijakan, baru berani dalam slogan dan pencitraan.

Akhirnya terbang jauh



Impor Masih didahulukan. Kondisi ke depan impor akan semakin meningkat karena lahirnya UU 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja tidak menjadikan produksi dalam negeri sebagai cara utama memenuhi pangan, tetapi impor akan didahulukan dengan alasan "kondisi tertentu". (Image : Infoekonomi.id)

"Darurat" Politik Pangan... (End)

Waktunya memasukkan indeks pendidikan anak sebagai tolok ukur kesejahteraan petani. Petani sejahtera itu punya anak yang kebutuhan pendidikannya terpenuhi dari dasar sampai pendidikan tinggi. Inilah kunci kesejahteraan petani yang harus didorong oleh pemerintah. Petani apapun kondisinya saat ini mampu bertahan dan "sukses" sebagai juara ditengah pandemi dengan kontribusi positif kepada perekonomian nasional.

makna kedaulatan, yang merdat justru impor dan menjadi-kan Indonesia sawah impor dengan segala kebiasaannya. Jangan mau terjebak definisi berdaulat model FAO yang semata berorientasi kepada row material yang justru menjadi-kan FAO gagal mengatasi kelaparan internasional dengan gagalnya menjaga keseimbangan an pangan global.

Seolah FAO "menikmati" orang yang mati di Afrika setiap 4 menit sekali, namun justru diam melihat 300.000 orang kegemukan tiap tahun di Amerika. Jadi, saatnya Indonesia berdaulat. Berani

kurangi impor secara signifikan, tegakkan hukum bagi para pemburu rente pangan, pemimpin menjadi contoh bagi pengembangan produk lokal, perkuat kapasitas industri dalam negeri, bergerak bersama dalam wujudkan daulat pangan nasioanal. Yakini Indonesia bisa berdaulat, 1984 kita telah membuktikan.

Petani Kunci Kedaulatan
Pemerintahan Jokowi sudah akan berakhir 20 Oktober 2024. Waktu yang cukup untuk membuktikan mampu menjadikan petani sejahtera. Faktanya masih jadi mimpi

petani, banyak janji yang belum ditepati. Salah satunya beridirinya Bank Petani dan Nelayan Indonesia sebagai wujud hadirkan kedaulatan pangan yang didahului kesejahteraan petani. Petani sejahtera apa wujudnya? Ukuran NTP sebenarnya sudah tidak relevan. Indeks bayar dan indeks yang diterima petani selalu saja tidak mampu memberikan gambaran serius kondisi ideal petani.

Waktunya memasukkan indeks pendidikan anak sebagai tolok ukur kesejahteraan petani. Petani sejahtera itu punya anak yang kebutuhan pendidikannya terpenuhi dari dasar sampai pendidikan tinggi. Inilah kunci kesejahteraan petani yang harus didorong oleh pemerintah. Petani apapun kondisinya saat ini mampu bertahan dan "sukses" sebagai juara ditengah pandemi dengan kontribusi positif kepada perekonomian nasional.

Jadi kalau mau negara Indonesia maju maka majukan petani, jadikan sebagai subyek dalam pembangunan nasional. Cetak petani muda, jadikan mereka wirausahawan nasional yang ini sesuai jati diri sebagai negara agraris. Inilah kuncinya. ●



Jadikan sebagai subyek. Jadi kalau mau negara Indonesia maju maka majukan petani, jadikan sebagai subyek dalam pembangunan nasional.

Hari Pangan Sedunia: Ketahanan Pangan dan Tantangan Global yang Harus Kita Atasi

SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku



Setiap tanggal 16 Oktober, dunia memperingati Hari Pangan Sedunia sebagai momen penting untuk merenungkan masalah pangan yang dihadapi jutaan orang di seluruh dunia. Pangan, yang seharusnya menjadi hak asasi manusia yang paling mendasar, hingga saat ini masih sulit diakses oleh banyak orang, terutama di negara-negara berkembang. Berdasarkan

laporan FAO, diperkirakan 735 juta orang di dunia masih hidup dalam kelaparan pada tahun 2023. Kondisi ini diperparah oleh perubahan iklim, krisis ekonomi, dan konflik yang mengganggu rantai pasokan pangan global.

Indonesia, sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alam, seharusnya mampu menjamin ketahanan pangannya sendiri. Namun,

pada kenyataannya, ketahanan pangan kita masih rentan terhadap berbagai tantangan. Perubahan iklim telah membawa dampak nyata terhadap sektor pertanian, mempengaruhi hasil panen dan memicu fluktuasi harga pangan. Sering kali, kita melihat banjir yang menghancurkan lahan pertanian dan kekeringan yang memperlambat pertumbuhan tanaman. Akibatnya,

produktivitas menurun, dan harga pangan menjadi tidak terjangkau bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Tidak hanya itu, kesejahteraan petani Indonesia masih menjadi isu yang mendesak. Meskipun mereka merupakan ujung tombak produksi pangan nasional, banyak petani yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Harga jual hasil pertanian yang

rendah dan tingginya biaya produksi membuat pendapatan mereka jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bagaimana mungkin kita bisa membangun ketahanan pangan yang kuat jika para petani—yang berperan penting dalam menyediakan makanan untuk bangsa—masih hidup dalam kesulitan?

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya

Hari Pangan Sedunia... (End)

untuk mengatasi tantangan ini, salah satunya dengan memperkenalkan pertanian cerdas iklim (Climate-Smart Agriculture) yang bertujuan membantu petani beradaptasi dengan perubahan cuaca. Namun, program ini masih perlu diperluas dan dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak petani di seluruh pelosok negeri. Akses terhadap teknologi pertanian modern dan informasi pasar juga harus diperbaiki, sehingga para petani bisa meningkatkan produktivitas mereka dan memperoleh harga jual yang lebih baik.

Distribusi pangan yang tidak merata juga menjadi masalah besar. Indonesia, dengan luas wilayah yang

terbentang dari Sabang hingga Merauke, sering kali menghadapi kesulitan dalam mendistribusikan pangan dari daerah yang surplus ke daerah yang kekurangan. Akibatnya, harga pangan di daerah terpencil bisa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di kota besar. Program tol laut yang bertujuan memperlancar distribusi ke daerah-daerah terpencil memang sudah diluncurkan, namun masih ada banyak kendala yang harus diatasi, seperti keterbatasan infrastruktur pelabuhan dan armada kapal.

Selain itu, ketergantungan Indonesia pada impor pangan untuk beberapa komoditas utama, seperti beras, gandum, dan kedelai, semakin membuat ketahanan pangan kita rapuh.

Indonesia, sebagai negara agraris yang kaya akan sumber daya alam, seharusnya mampu menjamin ketahanan pangannya sendiri. Namun, pada kenyataannya, ketahanan pangan kita masih rentan terhadap berbagai tantangan. Perubahan iklim telah membawa dampak nyata terhadap sektor pertanian, mempengaruhi hasil panen dan memicu fluktuasi harga pangan.

Ketika harga pangan global mengalami fluktuasi, masyarakat kita ikut terkena dampaknya. Oleh karena itu, diversifikasi pangan lokal sangat penting untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Konsumsi pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung, dan sagu harus lebih didorong agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu sumber pangan.

Dalam memperingati Hari Pangan Sedunia ini, kita harus mengingat bahwa ketahanan pangan bukan hanya tentang ketersediaan pangan, tetapi juga tentang akses yang adil dan merata untuk semua lapisan masyarakat. Ini adalah tanggung jawab bersama—antara pemerintah, petani, sektor swasta, dan masyarakat—untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang kelaparan. Ketahanan pangan juga harus dibangun dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan, karena tanpa menjaga sumber daya alam yang ada, kita tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pangan generasi mendatang.

Hari Pangan Sedunia menjadi pengingat bahwa kita perlu berkolaborasi secara lebih erat untuk menghadapi



diversifikasi pangan lokal sangat penting untuk mengurangi ketergantungan tersebut. Konsumsi pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung, dan sagu harus lebih didorong agar masyarakat tidak hanya bergantung pada satu sumber pangan. (Image : Istimewa)

tantangan yang ada. Ketahanan pangan harus menjadi prioritas nasional, dengan kebijakan yang berpihak pada petani dan program-program yang mendukung peningkatan produksi pangan lokal. Kita juga harus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola distribusi pangan, sehingga harga pangan bisa lebih terjangkau dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan adanya komitmen yang kuat dari semua pihak,

kita dapat membangun ketahanan pangan yang tangguh dan berkelanjutan. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, mari kita bersama-sama memastikan bahwa setiap orang, di mana pun mereka berada, memiliki akses terhadap pangan yang layak, bergizi, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tantangan ini memang besar, tetapi dengan kerja keras dan kolaborasi, kita bisa mewujudkan ketahanan pangan untuk semua. ●



Swasembada Pangan, PR Berat Pemerintahan Prabowo

H. JOHAN ROSIHAN, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil NTB I



Dunia memperingati Hari Pangan Sedunia setiap tanggal 16 Oktober, yang bertujuan meningkatkan kesadaran global tentang berbagai masalah yang terkait urusan pangan. Peringatan ini mengingatkan kita untuk lebih waspada terhadap ancaman krisis pangan global dan mendorong ketersediaan

pangan yang merata. Peringatan hari Pangan tahun 2024 ini juga berdekatan waktunya dengan hari pelantikan Presiden RI terpilih sehingga memiliki korelasi adanya harapan seluruh rakyat Indonesia agar tata kelola pangan nasional ke depan bisa lebih professional, terintegrasi, memiliki paradigma yang tepat serta mencapai

keunggulan daya saing di tengah persaingan pangan global.

Negara kita telah mengakomodir hak atas pangan di dalam konstitusinya, bahwa pangan itu adalah kebutuhan dasar paling utama. Jadi secara konstitusionalitas bahwa hak atas pangan dijamin oleh konstitusi negara karena itu penyelenggaraan pangan oleh

negara harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Salah satu program terpenting dari penyelenggaraan pangan adalah tercapainya swasembada pangan dan hal ini merupakan pekerjaan rumah (PR) terberat dari pemerintahan yang baru, yang akan dilantik tanggal 20 Oktober 2024 ini

sebagai moment dimulainya kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8.

Sebagaimana diketahui, pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia karena itu pemenuhan pangan harus bersifat adil, merata, berkelanjutan dan memiliki ketahanan pangan di setiap

Swasembada Pangan ... (2)

daerah. Ketidakmampuan atau ketergantungan memenuhi pangan nasional merupakan ancaman bagi suatu negara khususnya komoditas pangan strategis. Ini membuktikan bahwa urusan pangan sebagai sentral dari ketahanan nasional dan tantangan untuk menuju swasembada pangan nasional menjadi tugas berat pemerintahan Prabowo, karena tingkat kebutuhan pangan yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan adanya pergeseran pola konsumsi pangan yang tidak

diproduksi di dalam negeri menjadi tanggung jawab negara untuk menghadirkan kebijakan pangan nasional yang sesuai dengan tantangan zaman kekinian.

Tingkatkan Perhatian kepada Petani

Perhatian pemerintah kepada petani sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pangan nasional menuju swasembada harus diperkuat dalam kerangka ketahanan pangan nasional. Petani menjadi ujung tombak dalam mengatasi

berbagai kelangkaan pangan karena peningkatan produksi pangan dalam negeri sebagai indikator penting bagi tercapainya swasembada pangan nasional. Kebijakan nasional selama ini kurang berpihak pada pengembangan pertanian pangan sehingga semakin terpuruk dan dampaknya setiap tahun semakin menurun jumlah petani selaku pelaku (actor) utama di sektor pertanian pangan. Selain itu, kebijakan pangan selama ini tidak terintegrasi dan tidak membumi, selalu terpilah-pilah dalam berbagai kelompok instansi yang punya visi sendiri dan tidak pernah terkoordinasi bagus, dimana dampaknya setiap kebijakan pangan tidaklah mampu menyelesaikan akar permasalahan di lapangan sehingga persoalan pangan selalu muncul tanpa penyelesaian yang komprehensif.

Kinerja Pemerintahan Jokowi pada sektor pangan belum berhasil memperbaiki kesejahteraan petani, walaupun sector ini telah mampu membantukan peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional pada masa pandemi lalu. Perlu digarisbawahi bahwa Nilai Tukar Petani (NTP) Pangan sebagai indikator kesejahteraan petani terus mengalami penurunan, sehingga harus ada keberpi-



Perhatian pemerintah kepada petani sebagai garda terdepan dalam penyelenggaraan pangan nasional menuju swasembada harus diperkuat dalam kerangka ketahanan pangan nasional.

pangan merupakan kebutuhan mendasar manusia karena itu pemenuhan pangan harus bersifat adil, merata, berkelanjutan dan memiliki ketahanan pangan di setiap daerah. Ketidakmampuan atau ketergantungan memenuhi pangan nasional merupakan ancaman bagi suatu negara khususnya komoditas pangan strategis. Ini membuktikan bahwa urusan pangan sebagai sentral dari ketahanan nasional dan tantangan untuk menuju swasembada pangan nasional menjadi tugas berat pemerintahan Prabowo

hakan Pemerintahan Prabowo ke depan pada petani untuk meningkatkan kesejahteraan petani agar hidup lebih layak dan lebih sejahtera.

Sebagian masyarakat berharap pemerintahan Prabowo ke depan bisa memperbaiki kinerja pemerintahan sebelumnya dan melakukan langkah percepatan untuk meningkat-

kan produksi tanaman pangan dalam negeri sebagai upaya membangun basis ketahanan pangan untuk mencapai swasembada pangan nasional.

Hal ini hendaknya menjadi fokus perhatian pemerintah agar potensi tanaman pangan kita bisa maksimal dan kesejahteraan petani bisa lebih baik.

Swasembada Pangan ... (3)

Rusaknya Stabilitas Pangan selama 10 tahun Pemerintahan Jokowi

Sepanjang tahun 2014 sampai 2024 saat ini selalu diwarnai dengan fluktuasi harga komoditas pangan pokok yang tidak terkendali, dimana harga

selalu jatuh saat panen dan merugikan petani seperti jatuhnya harga gabah, harga jagung, cabai, bawang merah dan lain-lain, hal ini menjadi gambaran penting dari kinerja pemerintahan Jokowi. Sejak tahun 2014 hingga kini malah

produk pangan yang bersumber dari impor seperti daging dan kedelai, harganya terus melonjak yang berakibat merugikan pelaku UMKM serta merugikan konsumen karena daya beli yang semakin lemah.

Sebagai contoh, Pada tahun 2021 juga telah terjadi pergerakan kenaikan harga minyak goreng yang terus melambung dalam waktu yang cukup lama hingga beberapa bulan, padahal Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit (CPO) terbesar di dunia dengan pertumbuhan rata-rata 3,61% per tahun. Selain itu, bahwa setiap tahun pemerintah Jokowi selalu berencana melakukan impor jutaan ton beras dan hal ini telah menimbulkan polemik serta penolakan luas dari komponen masyarakat dan Presiden Jokowi pun berjanji tidak akan melakukan impor beras namun kenyataannya realisasi impor beras tetap tinggi pada setiap tahun.

Aspek lain yang perlu disoroti bahwa selama pemerintahan Jokowi belum ada kebijakan untuk mengurangi beban biaya produksi yang harus dikeluarkan petani seraya menambahkan fakta ternyata begitu banyak subsidi pupuk

Sepanjang tahun 2014 sampai 2024 saat ini selalu diwarnai dengan fluktuasi harga komoditas pangan pokok yang tidak terkendali, dimana harga selalu jatuh saat panen dan merugikan petani seperti jatuhnya harga gabah, harga jagung, cabai, bawang merah dan lain-lain, hal ini menjadi gambaran penting dari kinerja pemerintahan Jokowi. Sejak tahun 2014 hingga kini malah produk pangan yang bersumber dari impor seperti daging dan kedelai, harganya terus melonjak yang berakibat merugikan pelaku UMKM serta merugikan konsumen karena daya beli yang semakin lemah.

yang tidak tepat sasaran serta tidak ada kebijakan harga yang diterima petani sebagai harga yang layak untuk meningkatkan nilai pendapatan petani terhadap komoditas Pertanian yang dihasilkannya. Pemerintah telah terjebak pada program food estate yang banyak menyedot anggaran namun kesesuaian lahan masih bermasalah dan produktivitas yang belum teruji. Publik melihat selama ini pemerintah tidak fokus memperhatikan pengembangan lahan pertanian produktif terutama di Pulau Jawa yang luasnya terus menurun serta tidak punya visi

membangun kemandirian pangan nasional melalui program swasembada pangan.

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi tidak melakukan upaya pengendalian impor terhadap komoditas pangan yang bersumber dari produk pertanian yang terus meningkat setiap tahun dan seringkali berdampak fluktuasi harga yang tidak terkendali dan tidak berkembangnya produksi dalam negeri karena kalah bersaing dengan produk impor. Persoalan harga komoditas pangan belum bisa diantisipasi dan dimitigasi dengan baik oleh pemerintahan Jokowi, publik



Diharapkan Presiden Prabowo nantinya menetapkan kebijakan yang memberikan dampak positif terhadap perluasan areal panen, produksi dan juga produktivitas padi dan juga tanaman pangan lainnya.

Swasembada Pangan ... (End)

selalu mempertanyakan upaya pemerintah Jokowi dalam upaya stabilisasi harga pangan di pasaran, karena pada saat panen harga di tingkat petani selalu jatuh sehingga merugikan petani.

Adapun catatan penting terkait dengan lemahnya komitmen dan konsistensi pemerintahan Jokowi untuk membangun swasembada Pangan dalam mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia, hal ini dibuktikan dengan terus terjadinya impor pangan pada setiap tahun, menurunnya produksi pangan dalam negeri dan kesejahteraan petani. Selain itu, peringkat daya saing Indonesia semakin menurun, tahun 2020 di posisi 32 malah di tahun 2021 dan 2022 di posisi ke 40 dari 63 negara, sedangkan diantara negara Asia Pasifik, Indonesia peringkat 11 dari 14 negara. (Rilis dari IMD/International Institute Management Development).

Harapan Swasembada Pangan
Untuk mencapai swasembada pangan, pemerintahan Prabowo diharapkan segera menetapkan target swasembada padi yang ditopang oleh berbagai program-program teknis, regulasi, anggaran yang besar

Pemerintahan di bawah kepemimpinan Jokowi tidak melakukan upaya pengendalian impor terhadap komoditas pangan yang bersumber dari produk pertanian yang terus meningkat setiap tahun dan seringkali berdampak fluktuasi harga yang tidak terkendali dan tidak berkembangnya produksi dalam negeri karena kalah bersaing dengan produk impor.

dan rencana aksi selama lima tahun, termasuk pula ketentuan perlu ditingkatkannya penyediaan pupuk subsidi dan menambak secara signifikan anggaran subsidi pupuk. Kebijakan subsidi pupuk harus direalisasikan dengan tepat sasaran untuk peningkatan produksi padi dan tanaman pangan lainnya serta untuk peningkatan kesejahteraan petani.

Diharapkan Presiden Prabowo nantinya menetapkan kebijakan yang memberikan dampak positif terhadap perluasan areal panen, produksi dan juga produktivitas padi dan juga tanaman pangan lainnya.

Sumaryanto (2009) mengemukakan, kendala yang dihadapi dalam peningkatan ketersediaan produksi pangan

per kapita terutama adalah Pertumbuhan luas panen sangat terbatas, karena adanya Laju perluasan lahan pertanian baru sangat rendah, Konversi lahan Pertanian ke non Pertanian sulit dikendalikan serta Degradasi sumberdaya air dan kinerja irigasi serta turunnya tingkat kesuburan fisik dan kimia lahan Pertanian.

Adanya gejala kemandegan dalam pertumbuhan produktivitas. Jika terjadi penurunan produksi padi, mengakibatkan lebih banyak orang yang akan tergelincir pada jurang kemiskinan dan kelaparan. Penurunan produksi padi juga berakibat pada kenaikan harga beras dan turunnya daya beli masyarakat terhadap konsumsi beras.

Ketika pemerintahan



Adanya gejala kemandegan dalam pertumbuhan produktivitas. Jika terjadi penurunan produksi padi, mengakibatkan lebih banyak orang yang akan tergelincir pada jurang kemiskinan dan kelaparan.

Prabowo ke depan dapat berfokus pada pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan serta tantangan pangan berkelanjutan yang berorientasi pada swasembada pangan maka akan memberikan peran besar dalam peningkatan produksi pangan dalam negeri, pasokan pangan yang cukup, harga pangan yang stabil dan

memberi manfaat pertumbuhan ekonomi serta perbaikan nutrisi masyarakat. Semoga hasil dari indeks pangan kita yang memprihatinkan saat ini, segera menyadarkan pemerintahan Prabowo dan kita semua untuk menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas pembangunan pada masa kini dan mendatang. ●



Anggota DPR RI 2024-2029: **Wujudkan Kesejahteraan dan Melindungi Kelompok Rentan**

Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jawa Barat VIII

Anggota DPR RI diberi amanah besar untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat melalui peran legislatif yang kuat, efektif, dan berfokus pada kepentingan rakyat. Di tengah berbagai tantangan, kita harus memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang dilahirkan di Senayan benar-benar mampu menjadi instrumen perubahan yang signifikan.

Salah satu fokus utama yang harus terus diperjuangkan adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera. Masyarakat yang sejahtera tidak hanya dilihat dari ukuran ekonomi semata, tetapi juga dari rasa keadilan, keamanan, dan kenyamanan yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan ini tidak terlepas dari peran pemerintah dalam mengha-

dirkan kebijakan yang inklusif. Kebijakan inklusif adalah kebijakan yang dirancang untuk memastikan bahwa semua kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, mendapatkan manfaat yang adil dari program dan kebijakan tersebut. Prinsip inklusifitas ini mencakup pemberian akses yang sama terhadap layanan, kesempatan, dan perlindungan hukum bagi semua warga negara, terutama

bagi kelompok rentan dan terpinggirkan, seperti perempuan, anak-anak, kaum disabilitas, kelompok minoritas, dan masyarakat miskin.

Perlindungan bagi Perempuan dan Anak: Penguatan Undang-Undang yang Berpihak

Perempuan dan anak sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan dan

kekerasan. Berdasarkan data pada tahun 2023 dari tiga Lembaga yakni Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), dan Forum Pengada Layanan (FPL) terjadi kekerasan terhadap perempuan dengan jumlah kasus 34.682 korban.

Sementara itu, anak juga

Wujudkan Kesejahteraan... (End)

tidak terlepas dari bayang-bayang kekerasan di Indonesia. Menurut data yang masuk di laman Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) Kemen PPPA, per 1 Januari hingga 7 September 2024, 11.796 anak menjadi korban kekerasan dari 10.652 kasus. Fakta ini memanggil kita untuk terus memperjuangkan undang-undang yang mampu memberikan perlindungan maksimal bagi mereka.

Saat ini, kita perlu mendorong dan menguatkan sejumlah undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) serta peraturan terkait hak-hak anak lainnya.

Tidak hanya soal kekerasan fisik, kekerasan ekonomi dan diskriminasi juga masih menjadi tantangan yang harus kita atasi bersama. Sebagai anggota DPR, kita memiliki peran strategis untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang, memastikan bahwa setiap aturan yang ada benar-benar memberikan manfaat nyata dan perlindungan bagi perempuan serta anak.

Mewujudkan UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga: Kewajiban Moral dan Konstitusional
Salah satu kelompok pekerja

yang sering kali terlupakan dalam skema perlindungan hukum adalah pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia. Padahal, kontribusi mereka sangat besar dalam mendukung kestabilan ekonomi keluarga-keluarga di Indonesia. Selama ini, PRT kerap menghadapi berbagai bentuk eksploitasi, dari jam kerja yang panjang, upah yang rendah, hingga kekerasan fisik dan psikis. Sudah waktunya bagi kita untuk menuntaskan pembahasan dan pengesahan UU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga.

UU ini akan menjadi payung hukum yang tegas dalam memastikan hak-hak pekerja rumah tangga terlindungi, memberikan jaminan kesejahteraan bagi mereka, serta memperbaiki sistem kerja yang lebih manusiawi. Melalui undang-undang ini, kita bisa menciptakan sistem ketenagakerjaan yang lebih adil dan melindungi kelompok pekerja yang sering kali termarginalkan.

Dalam mewujudkan hal ini, kita tidak dapat bekerja sendirian. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang kita hasilkan benar-benar sesuai



Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang harus terus kita dorong, sehingga suara mereka terakomodasi dan kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab persoalan yang ada. (Image : Istimewa)

Peran Anggota DPR RI bukan hanya terbatas pada pembuatan undang-undang, tetapi juga menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat, memperjuangkan aspirasi mereka di setiap forum kebijakan. Dengan terus memperjuangkan undang-undang yang berpihak pada kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak, serta pekerja rumah tangga, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

dengan kebutuhan rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan undang-undang harus terus kita dorong, sehingga suara mereka terakomodasi dan kebijakan yang dibuat benar-benar menjawab persoalan yang ada.

Peran Anggota DPR RI bukan hanya terbatas pada pembuatan undang-undang, tetapi juga menjadi jembatan antara pemerintah dan rakyat, memperjuangkan aspirasi mereka di setiap forum kebijakan. Dengan terus memperjuangkan undang-undang yang berpihak pada

kesejahteraan, perlindungan perempuan dan anak, serta pekerja rumah tangga, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera.

Sebagai wakil rakyat, tugas kita adalah memastikan bahwa setiap langkah yang diambil di ruang sidang adalah langkah untuk memperkuat pijakan bangsa, melindungi mereka yang rentan, dan menciptakan sistem hukum yang berkeadilan bagi semua. Mari kita bersama-sama bergerak untuk Indonesia yang lebih baik, adil dan sejahtera.



**Kunjungi
Kanal Resmi
Fraksi PKS DPR RI**

-  Website
fraksi.pks.id
-  Instagram
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)
-  Twitter
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)
-  Facebook
[Fraksi PKS DPR RI](https://www.facebook.com/fraksi.pks.dpr.ri)
-  Youtube
[PKSTV DPR RI](https://www.youtube.com/playlist?list=PLKSTV DPR RI)

***Ikuti Berita
Parlementaria***
di Kanal Resmi Fraksi PKS